

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di pertengahan tahun 90-an, puncaknya, pada bulan Juli 1997, negara-negara di kawasan Asia mengalami krisis moneter yang menjurus kepada krisis ekonomi seperti di negara Thailand, Korea Selatan dan di Indonesia. Persoalan menjadi bertambah runyam di Indonesia, karena krisis ekonomi tersebut menjaral pula kepada krisis politik dan berujung kepada pergantian kekuasaan politik. Krisis keuangan yang melanda di Indonesia itu terus berlanjut, Indonesia meminta bantuan pinjaman IMF (*International Monetary Fund*) sebesar 23 milyar dollar AS, namun kurs rupiah atas dollar terus merosot, bahkan pernah mencapai angka di atas Rp. 10.000 per dollar AS. Angka tersebut lebih rendah dari periode sebelum mendapatkan pinjaman dari IMF.¹ Akibat nilai tukar rupiah yang merosot tersebut mengakibatkan mahalnya harga-harga bahan pokok di pasar, banyaknya PHK, meningkatnya angka pengangguran, dan meningkatnya tindak kriminalitas dalam masyarakat.

Ada beberapa faktor yang mengakibatkan terjadinya krisis ekonomi ini dan terbagi menjadi dua yaitu faktor eksternal dan internal. Dari sisi eksternal krisis ekonomi ini terjadi karena ada tiga faktor. *Pertama*, globalisasi ekonomi kapitalis, dalam konteks ini, imperialisasi dan supremasi kekuatan ekonomi industri negara-negara besar terhadap negara kecil sangat berpengaruh. *Kedua*, fluktuasi pasar, dalam konteks ini nilai tukar mata uang nasional tentu di tentukan oleh pasar. *Ketiga*, Peran spekulasi, sebelum krisis ekonomi ini terjadi para spekulasi mengetahui bahwa banyak negara di Asia khususnya Indonesia yang memiliki hutang jangka pendek yang akan jatuh tempo, kemudian para spekulasi ini mengambil keuntungan dengan

¹ Denny J.A, *Jatuhnya Soeharto dan Transisi Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: LKIS, 2006, Hlm. 16-17.

nilai jual tinggi atas kurs dollar yang sedang mereka butuhkan sehingga dollar AS menjadi langka dan nilai uang domestik menjadi terjungkal.²

Adapun faktor internal terjadinya krisis ekonomi di Indonesia tahun 1997 ini ada empat faktor. Pertama, Pembangunan lebih mengedepankan strategi pertumbuhan, maksudnya pemerintah menetapkan strategi pertumbuhan nasional yang menitikberatkan pada pembangunan industri yang menopang pertanian, prioritas strategi pertumbuhan mengakibatkan pembangunan, demi efisiensi proses produksi difokuskan pada sentra wilayah tertentu yakni wilayah Pulau Jawa dan pusat-pusat kota besar. Hasilnya memuaskan, tetapi secara riil pemerataan menjadi timpang, standar hidup di pulau Jawa menjadi lebih tinggi dibandingkan kota-kota lain. Kedua, strategi pembangunan menganak emaskan pengusaha, pemerintah mengutamakan pembangunan industri dan target untuk memperbesar ekspor, pemerintah butuh pengusaha untuk mitranya, padahal saat itu posisi pengusaha domestik masih dalam keadaan lemah, akibatnya pengusaha tergantung kepada pemerintah dimana pemerintah yang menjadi mesin pertumbuhan ekonomi sekaligus penggerak investasi dan pengalokasian kekayaan negara.³

Kemudian faktor yang ketiga adalah pembangunan terlalu mengandalkan hutang dari luar negeri, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, asumsi pemerintah perlu melakukan pinjaman yang besar dari luar negeri, akibatnya hutang pemerintah terus membengkak, tercatat pinjaman luar negeri pemerintah dan badan usaha milik negara pada tahun 1993 berjumlah 52,461 juta dollar AS, dan mengalami naik turun sampai pada tahun 1997 menjadi 53,865 juta dollar AS. Keempat, strategi pembangunan di dasari atas sistem otoriterisme, untuk mengendalikan persaingan pasar dan stabilitas nasional, pemerintah melakukan serangkaian

² Lilik Salamah, *Lingkaran Krisis Indonesia, Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*, Jurnal Th XIV, No. 2, April 2001, hlm 66-67.

³ Lilik Salamah, "*Lingkaran Krisis....*" hlm. 69.

kebijakan mulai dari depolitisasi massa, pengendalian elit politik maupun birokrasi melalui langkah-langkah halus institusional struktural, seperti penetapan undang-undang sampai langkah-langkah destruktif melalui teror politik. Pendekatan keamanan (*security approach*) ini menghasilkan pembangunan ekonomi secara stabil, tetapi sifatnya sangat semu. Kepatuhan dan partisipasi rakyat dalam pembangunan bukan karena kesadaran moral, melainkan karena keterpaksaan dan ketakutan yang terpendam. Akibatnya, begitu rezim Orde Baru runtuh rakyat berani memberontak. Demonstrasi, pemogokan serta bermunculannya puluhan partai politik baru, merupakan wujud dari ketidakpuasan yang lama terpendam itu.⁴

Akibat krisis ekonomi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan yang kontroversial. Seperti menaikkan harga BBM, sejak tahun 1995 sampai 1998 harga yang semula Rp. 550 menjadi Rp. 1200. Tingkat pengangguran di Indonesia pun semakin tinggi, kesulitan warga masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok. Harga-harga sembilan bahan pokok (sembako), seperti beras, terigu, minyak goreng, minyak tanah, gula, susu, telur, ikan kering, dan garam mengalami kenaikan yang tinggi. Bahkan, warga masyarakat harus antri untuk membeli sembako itu. Sementara, situasi politik dan kondisi ekonomi Indonesia semakin tidak menentu dan tidak terkendali. Harapan masyarakat akan perbaikan politik dan ekonomi semakin jauh dari kenyataan. Keadaan itu menyebabkan masyarakat Indonesia semakin kritis dan tidak percaya terhadap pemerintahan Orde Baru.⁵

Pada tahun 1993 tepatnya saat Tanwir Muhammadiyah di Surabaya, Amien Rais melontarkan isu penting, yakni suksesi kepemimpinan nasional. Tetapi isu suksesi nasional tersebut tidak lagi dibahas oleh Muhammadiyah karena sangat sensitif. Baru setelah muktamar ke 43 Muhammadiyah di Aceh tahun 1995, Amien Rais berhasil menjadi ketua PP

⁴ Jurnal ilmu sosial transformatif "*pengantar wacana*", no. 3, 1999.

⁵ Aspinall Edward, *Titik Tolak Reformasi Hari-Hari Terakhir Presiden Soeharto*, Yogyakarta: LkiS, 2000, hal. 333.

Muhammadiyah dan kembali mengeluarkan isu suksesi nasional tersebut dan menyuarakan pada pemilu 1997 kelak harus ada kandidat lain selain Soeharto sebagai Calon Presiden dan dikenal dengan slogan suksesi kepemimpinan.

Keadaan dan kebijakan Politik antara tahun 1995-1998 sangat tidak kondusif, yang mana kehidupan politik sangat *represif*, yaitu adanya tekanan dari pemerintah terhadap pihak oposisi dan orang-orang yang berfikir kritis. Ciri-ciri kehidupan politik sangat *represif* diantaranya, Setiap orang atau kelompok yang mengkritik kebijakan pemerintah dituduh sebagai tindakan *subversif* (menentang Negara Kesatuan Republik Indonesia), Pelaksanaan Lima Paket UU Politik yang melahirkan demokrasi semu atau demokrasi rekayasa, terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela dan masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengontrolnya, Pelaksanaan Dwi Fungsi ABRI yang memasung kebebasan setiap warga negara (sipil) untuk ikut berpartisipasi dalam pemerintahan, dan terciptanya masa kekuasaan presiden yang tak terbatas. Meskipun Soeharto dipilih menjadi presiden melalui Sidang Umum MPR, tetapi pemilihan itu merupakan hasil rekayasa dan tidak demokratis.⁶

Sementara itu, setahun sebelum terjadinya krisis ekonomi politik yang mengantarkan Soeharto mengundurkan diri dari kursi presiden, Indonesia menyelenggarakan pemilu pada tahun 1997. Pada pemilu ini Golkar sebagai partai penguasa memperoleh kemenangan yang hampir mutlak dengan persentase sebesar 74 persen. Kemenangan Golkar mengindikasikan bahwa perubahan pimpinan nasional tidak berhasil. Dengan demikian, Soeharto akan kembali menjadi presiden. Ide suksesi nasional pertama kali di lontarkan oleh Amien Rais pada saat tanwir Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1993.⁷

⁶ M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*, Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2001, hlm. 471.

⁷ Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Satu Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas Media, 2010, hlm. 110.

Untuk merespon dinamika politik bangsa yang carut marut, Muhammadiyah melalui Amien Rais menganggap perbaikan bangsa mustahil dapat dilakukan tanpa melakukan pergantian kepemimpinan nasional (presiden). Untuk memberikan tekanan kepada pemerintah menunjukkan kekuatannya, Muhammadiyah melalui Tabligh Akbar dan Apel Kokam di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta, Ketua PP Muhammadiyah yang saat itu dijabat Amien Rais mengatakan bahwa diperlukan reformasi atau perubahan-perubahan yang jelas, konkret dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki krisis di Indonesia.⁸

Muhammadiyah sejak awal berdirinya memang lebih menitikberatkan pembaharuannya di bidang Agama yang dapat dilihat dari semangat perjuangannya yang berdasarkan Al-Qur'an yaitu Q.S Al Imran ayat 104. Yang mana dalam surat ini Muhammadiyah meletakkan khittah atau strategi dasar perjuangannya yaitu dakwah (menyeru, mengajak) Islam, dan Amar Maruf Nahi Munkar dengan masyarakat sebagai medan juangnya. Namun seiring berjalannya waktu Muhammadiyah mulai terlibat dengan politik dan merasa perlu berpolitik.

Kemudian ayat Al Qur'an yang berhubungan dengan kebijakan politik suatu pemerintahan dapat dilihat dalam Q.S An Nisa ayat 58 yang mana dalam surat ini disebutkan "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu dan sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat." Dalam surat An Nisa ayat 58 ini dapat disimpulkan bahwa setiap pemimpin harus menetapkan hukum (kebijakan) yang seadil-adilnya untuk masyarakat yang dipimpinnya.

⁸ Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Satu Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm 312.

Pada tahun 1998, Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan politik, yakni prihatin bahwa krisis moral dan keteladanan telah berkembang menjadi krisis moneter dan ekonomi serta krisis kepercayaan terhadap penyelenggara negara masih terus berlangsung. Dan upaya reformasi politik, ekonomi dan hukum secara konstitusional dan damai harus dilakukan, dan terakhir terciptanya pemerintahan yang bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme).⁹

Dengan banyaknya krisis di Indonesia tersebut, maka banyak menimbulkan reaksi baik dari masyarakat, mahasiswa, dan tokoh-tokoh intelektual. Yang menginginkan adanya perubahan dan mencabut jabatan Soeharto sebagai presiden Republik Indonesia, salah satu yang menginginkan pencabutan jabatan Soeharto sebagai Presiden adalah organisasi Muhammadiyah, Melalui ketua umumnya saat itu yaitu Amien Rais yang dikenal juga sebagai “bapak reformasi Indonesia”. Maka dari itu, peneliti mengambil judul “Respon Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru di Indonesia Tahun 1995-1998”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, agar penelitian ini lebih terarah maka dibuat batasan-batasan penelitian dengan membuat rumusan masalah. Sebagaimana rumusan masalah di bawah ini:

1. Bagaimana kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia Tahun 1995-1998?
2. Bagaimana respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia Tahun 1995-1998?

⁹ Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010. hlm 314.

C. Tujuan Penelitian

Adapun penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui bagaimana kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia tahun 1995-1998.
2. Mengetahui bagaimana respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia tahun 1995-1998.

D. Kajian Pustaka

Terkait Pembahasan mengenai perpolitikan Muhammadiyah di tahun 1995-1998 dengan judul "*Respon Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru Pada Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Politik Di Indonesia Tahun 1995-1998*", sebagai upaya menghindari kerancuan, pelebaran pokok bahasan dan mencegah plagiasi objek studi, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan buku atau karya ilmiah serta tulisan yang berkaitan dengan objek kajian yang dibahas. Peneliti belum menemukan skripsi yang berjudul "*Respon Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru Pada Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Politik Di Indonesia Tahun 1995-1998*", di fakultas maupun jurusan lain, namun jika terkait dengan tema yang di angkat, ada beberapa literatur buku sebagai sumber sekunder, yang tema atau pembahasannya mendekati dengan tema yang peneliti bahas pada skripsi. Dari semua buku yang ada, ada beberapa buku yang mendekati dengan tema pembahasan dan masing-masing memiliki perbedaan dengan yang penulis teliti saat ini, namun masih memiliki keterkaitan baik terhadap judul, maupun materi yang akan di bahas.

Adapun literatur atau buku dan skripsi yang memiliki kedekatan tema dengan penelitian yang peneliti angkat di antaranya:

1. Buku tentang Muhammadiyah yaitu dalam berbagai kumpulan artikel seperti "*Perkembangan Muhammadiyah dari masa ke Masa: Pergumulan Pemikiran dalam*

- Muhammadiyah” yang ditulis untuk menyongsong Muktamar ke-41 dengan editor Sukriyanto A.R. dan Abdul Mulkan,
2. Muhammadiyah dalam Gonjang-Ganjing Politik: Telaah Kepemimpinan Muhammadiyah Era 1990 yang di tulis oleh Andi Wahyudi. Dalam buku ini di uraikan bagaimana kepemimpinan Muhammadiyah serta bagaimana Muhammadiyah berpolitik di era 1990-an.
 3. Kemudian peneliti juga menemukan karya tulis berbentuk skripsi berjudul “Kepentingan Politik Muhammadiyah di Era Reformasi (studi masa kepemimpinan Din Syamsuddin)” yang di tulis oleh Azhari yang berasal dari Universitas Sumatera Utara. Peneliti menemukan skripsi ini di internet. Dalam skripsi ini di uraikan bagaimana Muhammadiyah dalam berpolitik tetapi lebih menitik beratkan kepada kiprah tokoh Din Syamsuddinnya saja, di rasa perlu penambahan bahwa tokoh yang terlibat pada saat itu bukan hanya Din Syamsuddin saja dan metode penulisan yang di gunakan pun bukan menggunakan metode sejarah dan tahun yang di telitinya pun berbeda dengan yang peneliti lakukan yang mana dalam skripsi ini tahun yang di gunakan yaitu antara tahun 2005-2014.

E. Langkah-langkah Penelitian

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode historis, yaitu dengan proses menguji dan menganalisis secara kritis mengenai peninggalan masa lampau berdasarkan sumber yang telah diperoleh dan dikumpulkan.¹⁰ Metode historis ini bertujuan merekonstruksi kejadian masa lampau secara sistematis dan obyektif. Dengan cara mengumpulkan dan memverifikasikan serta mensintesisikan temuan untuk mendapatkan fakta dan kesimpulan yang kuat. Karena metode yang di gunakan adalah metode sejarah, tentu saja berkaitan dengan peristiwa-peristiwa sosial yang pada hakekatnya bersifat non eksak.

¹⁰ Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, di terjemahkan oleh Nugroho Notosusanto Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 32.

Dalam penelitian mengenai “*Respon Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru Pada Bidang Pendidikan, Ekonomi, dan Politik Di Indonesia Tahun 1995-1998*”, peneliti merasa perlu mencari data-data yang akurat, untuk mendapatkan data yang akurat ini maka di perlukan tahapan-tahapan dalam pencarian data atau sumber tersebut. Adapun tahapannya ialah Heuristik, Kritik (Internal dan Eksternal), Interpretasi, serta Historiografi.

1. Heuristik

Heuristik adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cara telaah sumber, baik sumber primer maupun sekunder. Telaah dokumen atau sering disebut dengan metode deskriptif analisis yaitu dengan melakukan kajian buku-buku para pemikir umum dan pemikir muslim tentang buku yang membahas masalah Muhammadiyah dalam keterlibatannya dalam perpolitikan di Indonesia.

Peneliti mendapatkan sumber buku-buku dari perpustakaan baik perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Perpustakaan Daerah (Bapusipda), kemudian jurnal-jurnal dari internet, mendapatkan *E-Book* dari situs resmi Muhammadiyah, Koran atau majalah dari situs Kompas, Jawa Pos, Republika, Merdeka, dan Pikiran Rakyat, serta artikel-artikel atau karya tulis lainnya, dan yang terakhir dari youtube tepatnya acara Liputan 6 SCTV tahun 1998.

Kemudian peneliti mencari dan mendapatkan sumber-sumber dari majalah dan koran di perpustakaan nasional. Peneliti juga mendapatkan arsip dari Arsip Nasional Republik Indonesia.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara terhadap Pak Hasan Arief yang mana beliau merupakan ketua bidang Muhammadiyah yang membawahi bidang Pendidikan dan LPCR. Beliau juga pada saat masa reformasi masih menjabat sebagai ketua bidang Muhammadiyah yang sama seperti sekarang ini jadi beliau merupakan saksi sekaligus pelaku yang mana bisa membantu dalam penelitian ini.

Adapun sumber yang di dapat ini di pilah dan di bagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber yang berasal dari pelaku sejarah atau kesaksian dari saksi dengan mata kepala sendiri yang menyaksikan suatu peristiwa sejarah, dan sumber yang di dapat dari seorang yang hidup sezaman dengan suatu peristiwa yang didapatkan.¹¹

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah istilah sumber yang ditulis berdasarkan sumber primer, dan biasanya merujuk pula pada sumber sekunder lainnya.

Ada beberapa cara yang peneliti gunakan untuk mencari dan mendapatkan sumber-sumber di antaranya menggunakan literatur buku atau pustaka yang dilakukan dengan mengunjungi beberapa perpustakaan. Salah satunya di perpustakaan Bapusipda Bandung, dari beberapa situs di internet salah satunya adalah situs resmi Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk mendapatkan dokumen dan foto-foto yang berkaitan, serta melakukan wawancara.

Setelah semua data tersebut di temukan, maka yang peneliti lakukan adalah mengkategorikan tersebut menjadi dua kategori, yaitu sumber primer yang artinya berkaitan langsung dengan perpolitikan Muhammadiyah, dan sumber sekunder yang di dapat dari berbagai sumber tertulis yang menceritakan mengenai respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru di Indonesia tahun 1995-1998.

Sumber atau data yang di temukan di antaranya :

a. Sumber Primer

1. Arsip

¹¹ Luis Gottschalk, *Mengerti Sejarah....* hlm. 35.

- a) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 3 tentang nilai tukar mata uang asing dalam dolar sampai harga rata-rata minyak mentah di Indonesia tahun 1989-1997.
- b) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 5 tentang langkah dan kebijakan untuk pengembangan sektor riil tahun 1997-1998.
- c) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 102 tentang hasil muktamar Muhammadiyah tahun 1995.
- d) Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) no. 33975 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) keenam tahun 1994-1998.
- e) Arsip Nasional Republik Indonesia tentang berhentinya Soeharto sebagai presiden tahun 1998.
- f) Arsip Nasional Republik Indonesia tentang pemindahan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie tahun 1998.
- g) Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) keenam tahun 1994/95-1998/1999.

2. Koran dan Majalah

- a) Merdeka, sabtu, 9 Mei 1998, *500 Mahasiswa Muhammadiyah di Angkut Truk ke Polda.*

3. Buku

- a) Lembaga Pustaka dan Informasi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2010, *“Satu Abad Muhammadiyah”*, Jakarta: Kompas.

4. Lisan

- a) Hasan Arief, laki-laki, usia 68 tahun, ketua bidang Muhammadiyah yang membawahi bidang Pendidikan dan LPCR Kota Bandung, Bandung: kantor PDM Kota Bandung, di laksanakan pada tanggal 2 Mei 2017.

b) Dadang Kahmad, beliau merupakan mantan ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat periode 2000-2010, ketua PC Muhammadiyah Ujung Berung periode 1995-2000, dan ketua PR Muhammadiyah periode Cipadung 1990-1995. Dan beliau pun merupakan seorang guru besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua umum di Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang Pustaka dan Informasi.

c) Ayat Dimiyati, beliau merupakan ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat.

5. Sumber Visual

a) SCTV, Liputan 6, *Sikap Politik Muhammadiyah Era Reformasi*, tayang tahun 1998.

b. Sumber Sekunder

1. Buku

a. Abdul Munir Mul Khan, dkk, 1985, "*Perkembangan Pemikiran Muhammadiyah Dari Masa Ke Masa: Menyambut Muktamar ke-41*" Yogyakarta: Dua Dimensi.

b. Andi Wahyudi, 1999, "*Muhammadiyah Dalam Gonjang Ganjing Politik: Telaah Kepemimpinan Muhammadiyah Era 90-an*" Yogyakarta: Media Pressindo.

c. Syaifullah, 1997, "*Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*", Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.

d. Amien Rais, 2010, "*Satu Abad Muhammadiyah Istiqamah Membendung Kristenisasi dan Liberalisme*" Yogyakarta: MTDK-PPM.

e. Amien Rais, 2008, "*Agenda Mendesak Bangsa, Selamatkan Indonesia*", Yogyakarta: PPSK Press.

f. Editor Zuly Qodir, dkk. 2015, "*Ijtihad Politik Muhammadiyah: Politik Sebagai Amal Usaha*", Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

g. David Evendi, 2014, "*Politik Elite Muhammadiyah*", Yogyakarta: Reviva Press.

2. Kritik sumber (verifikasi).

Pada tahapan ini kritik sumber bertujuan untuk menguji otentitas dan kredibilitas sumber. Verifikasi atau kritik dilakukan dengan cara mengoreksi sumber yang telah dikumpulkan untuk diketahui apakah sumber yang telah dikumpulkan itu benar-benar otentik dan kredibel, sehingga relevan dengan peristiwa yang akan disusun. Untuk itulah peneliti membagi menjadi dua untuk cara mengkritik sumber. Yaitu:

a. Kritik Eksternal

Kritik eksternal menurut Daliman yaitu ingin menguji otentitas (keaslian) suatu sumber, agar di peroleh sumber yang sungguh-sungguh asli dan bukannya tiruan ataupun palsu.¹² Maksudnya, dalam tahapan kritik eksternal ini, peneliti mencoba mencari dan mendapatkan keotentikan dari sumber-sumber yang di dapat melalui keadaan fisik sumber tersebut.

Untuk mencari dan mendapatkan keotentikan dari sumber tersebut, maka peneliti melakukan pengujian dan membuat pertanyaan seperti kapan sumber ini dibuat, dimana sumber ini dibuat, dan siapa yang membuat sumber ini, serta apakah bahan dari sumber ini asli.

Dalam proses kritik eksternal juga harus di pertanyakan bagaimana kertas yang digunakan apakah sesuai zamannya, bagaimana dengan tintanya, gaya tulisannya, serta tanda tangannya.

1. Arsip

- a) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 3 tentang nilai tukar mata uang asing dalam dolar sampai harga rata-rata minyak mentah di Indonesia tahun 1989-1997. Sumber ini dijadikan sumber primer karena dilihat dari tahunnya memiliki tahun yang sama dengan penulis ambil, dan kualitas dari arsip ini juga masih dalam kondisi bagus dan jelas. Arsip ini dibuat langsung oleh menko ekonomi dan dibuat antara tahun 1989-1997.

¹² Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012, hlm 67.

- b) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 5 tentang langkah dan kebijakan untuk pengembangan sektor riil tahun 1997-1998. Sumber ini dijadikan sumber primer karena dilihat dari tahunnya memiliki tahun yang sama dengan penulis ambil, dan kualitas dari arsip ini juga masih dalam kondisi bagus dan jelas. Arsip ini dibuat langsung oleh menko ekonomi dan dibuat antara tahun 1997-1998.
- c) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 102 tentang hasil muktamar Muhammadiyah tahun 1995. Sumber ini dijadikan sumber primer karena dilihat dari tahunnya memiliki tahun yang sama dengan penulis ambil, dan kualitas dari arsip ini juga masih dalam kondisi bagus dan jelas. Arsip ini dibuat langsung oleh menko ekonomi ekuasbang dan dibuat tahun 1995.
- d) Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) no. 33975 tentang Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) keenam tahun 1994-1998. Sumber ini dijadikan sumber primer karena dilihat dari tahunnya memiliki tahun yang sama dengan penulis ambil, dan kualitas dari arsip ini juga masih dalam kondisi bagus dan jelas. Arsip ini dibuat langsung oleh Bappenas dan dibuat tahun 1994.
- e) Arsip Nasional Republik Indonesia tentang berhentinya Soeharto sebagai presiden tahun 1998. Sumber ini dijadikan sumber primer karena dilihat dari tahunnya memiliki tahun yang sama dengan penulis ambil, dan kualitas dari arsip ini juga masih dalam kondisi bagus dan jelas.
- f) Arsip Nasional Republik Indonesia tentang pemindahan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie tahun 1998. Sumber ini dijadikan sumber primer karena dilihat dari tahunnya memiliki tahun yang sama dengan penulis ambil, dan kualitas dari arsip ini juga masih dalam kondisi bagus dan jelas.

2. Visual

- a) SCTV, Liputan 6, *Sikap Politik Muhammadiyah Era Reformasi*, tayang tahun 1998. Sumber ini di jadikan sumber primer karena dilihat dari tahun yang memiliki kesamaan dengan skripsi penulis dan kualitas dari video ini pun masih bagus dan jelas..

3. Buku

- a) Buku yang berjudul *Satu Abad Muhammadiyah*. Buku satu abad Muhammadiyah ini dibuat pada tahun 2010 di Jakarta, dan yang membuat buku ini adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian kertas yang digunakan sesuai dengan zamannya karena warna kertas yang sudah mulai kecoklatan dan itu menunjukkan sudah berapa lama kertas ini digunakan, tinta juga menggunakan tinta yang sama dengan tahun buku ini di terbitkan karena warna cover serta tulisan di dalamnya sedikit mengalami kepudaran, kemudian gaya tulisan serta tanda tangannya tentu saja sesuai dengan tahun buku ini di terbitkan karena dalam buku ini setelah kata pengantar terdapat nama penulis serta bulan dan tahun nya.

4. Sumber Lisan

- a) Hasan Arief, laki-laki, usia 68 tahun, Bandung: kantor PDM Kota Bandung, di laksanakan pada tanggal 2 Mei 2017. Masuk dalam sumber primer karena beliau merupakan ketua bidang Muhammadiyah yang membawahi bidang Pendidikan dan LPCR Kota Bandung, yang mana pendidikan merupakan salah satu tema dalam skripsi ini, umurnya pun masih produktif untuk mengingat semua peristiwa yang terjadi sehingga beliau dikategorikan pelaku dan saksi sejarah.
- b) Dadang Kahmad, laki-laki, usia 66 tahun, Masuk dalam sumber primer karena beliau merupakan mantan ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat periode 2000-2010, ketua PC Muhammadiyah Ujung Berung periode 1995-2000,

dan ketua PR Muhammadiyah periode Cipadung 1990-1995. Dan beliau pun merupakan seorang guru besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua umum di Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang Pustaka dan Informasi. yang mana di lihat sejak tahun 1995 beliau sudah memiliki jabatan di Muhammadiyah, umurnya pun masih produktif untuk mengingat semua peristiwa yang terjadi sehingga beliau dikategorikan pelaku dan saksi sejarah.

b. Kritik internal

Dalam tahap ini peneliti melakukan kritik internal, yang dalam pelaksanaannya lebih menitik beratkan pada kebenaran dan keaslian data dengan mencari korelasi sumber-sumber yang ada, sehingga dapat ditarik fakta untuk penulisan sejarah. Kritik internal ini lebih menekankan isi dari yang di sampaikan suatu sumber.

1. Arsip

- a) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 3 yang mana isinya tentang nilai tukar mata uang asing dalam dolar sampai harga rata-rata minyak mentah di Indonesia tahun 1989-1997. Di jadikan sumber primer karena isi dari arsip ini sesuai dengan salah satu tema yang di bahas dalam skripsi ini yakni ekonomi antara tahun 1995-1998.
- b) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 5 yang mana isinya tentang langkah dan kebijakan untuk pengembangan sektor riil tahun 1997-1998. Di jadikan sumber primer karena isi dari arsip ini sesuai dengan salah satu tema yang di bahas dalam skripsi ini yakni ekonomi antara tahun 1997-1998.
- c) Arsip Menko ekonomi, keuangan dan pembangunan (Ekuasbang) no 102 yang mana isinya tentang hasil muktamar Muhammadiyah tahun 1995. Di jadikan

sumber primer karena isi dari arsip ini sesuai dengan tema yang di bahas dalam skripsi ini.

- d) Arsip Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) no. 33975 yang mana isinya tentang Rancangan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita) keenam tahun 1994-1998. Di jadikan sumber primer karena isi dari arsip ini sesuai dengan tema yang di bahas dalam skripsi ini yakni kebijakan politik pemerintah Orde Baru baik itu pendidikan, ekonomi, dan politik antara tahun 1995-1998.
- e) Arsip Nasional Republik Indonesia yang mana isinya tentang berhentinya Soeharto sebagai presiden tahun 1998. Di jadikan sumber primer karena isi dari arsip ini sesuai dengan salah satu tema yang di bahas dalam skripsi ini.
- f) Arsip Nasional Republik Indonesia yang mana isinya tentang pemindahan kekuasaan dari Soeharto ke B.J. Habibie tahun 1998. Di jadikan sumber primer karena isi dari arsip ini sesuai dengan tema yang di bahas dalam skripsi ini.

2. Visual

- a) SCTV, Liputan 6, *Sikap Politik Muhammadiyah Era Reformasi*, tayang tahun 1998. Dilihat dari isi video ini, ada pihak dari Muhammadiyah yang memberi penjelasan mengenai sikap politik Muhammadiyah tahun 1998, yang mana isi berita ini berkaitan dengan tema skripsi yang penulis angkat sehingga sumber ini bisa dijadikan sumber primer.

3. Buku

- a) Buku yang berjudul *Satu Abad Muhammadiyah*. Buku satu abad Muhammadiyah ini dibuat pada tahun 2010 di Jakarta, dan yang membuat buku ini adalah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kemudian kertas yang digunakan sesuai dengan zamannya karena warna kertas yang sudah mulai kecoklatan dan itu menunjukkan sudah berapa lama kertas ini digunakan, tinta juga menggunakan tinta yang sama dengan tahun

buku ini di terbitkan karena warna cover serta tulisan di dalamnya sedikit mengalami kepodaran, kemudian gaya tulisan serta tanda tangannya tentu saja sesuai dengan tahun buku ini di terbitkan karena dalam buku ini setelah kata pengantar terdapat nama penulis serta bulan dan tahun nya.

4. Sumber Lisan

- a) Hasan Arif, laki-laki, berusia 68 tahun, asal bandung. Latar belakang beliau merupakan ketua bidang pendidikan Muhammadiyah di LPCR kota Bandung. Pada tahun 1995-1998 yang mana tahun tersebut merupakan salah satu tolak ukur penelitian skripsi ini, beliau juga menjabat ketua di bidang pendidikan Muhammadiyah Kota Bandung. Tentu saja dengan latar belakang tersebut peneliti merasa dapat memastikan bahwa beliau dapat di jadikan sumber rujukan primer karena beliau merupakan saksi dan mengetahui betul bagaimana situasi politik serta sosial tahun 1995-1998 tersebut. Dari isi penyampaiannya pun beliau terlihat tidak terbata-bata dan menjawab langsung pertanyaan yang peneliti sampaikan.
- b) Dadang Kahmad, beliau merupakan mantan ketua PW Muhammadiyah Jawa Barat periode 2000-2010, ketua PC Muhammadiyah Ujung Berung periode 1995-2000, dan ketua PR Muhammadiyah periode Cipadung 1990-1995. Dan beliau pun merupakan seorang guru besar Sosiologi Agama di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan saat ini beliau juga menjabat sebagai ketua umum di Pimpinan Pusat Muhammadiyah di bidang Pustaka dan Informasi. Masuk dalam sumber primer karena berdasarkan wawancara yang dilakukan beliau banyak memberikan informasi mengenai tema skripsi yang penulis angkat.

3. Interpretasi

Interpretasi adalah upaya penafsiran atas fakta-fakta sejarah dalam kerangka rekonstruksi realitas masa lampau.¹³ Dalam tahapan interpretasi ini peneliti mencoba menafsirkan fakta-fakta yang telah di kumpulkan dan telah melewati tahapan kritik, baik itu eksternal maupun internal untuk mendapatkan fakta sejarah. Dalam tahapan interpretasi ini peneliti mencoba untuk se-objektif mungkin dan menghindari subjektivitas dalam menuliskan fakta sejarah yang di dapat.

Kajian penelitian yang di lakukan peneliti yaitu mengenai Respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru di Indonesia tahun 1995-1998, yang merupakan bentuk kajian organisasi masyarakat yang bergerak dan pembaharu di bidang sosial keagamaan. Walaupun Muhammadiyah ini merupakan organisasi yang bergerak di bidang sosial keagamaan tetapi pada tahun 1998 Muhammadiyah merasa memiliki tanggung jawab dan mengambil sikap untuk terlibat dalam politik, walaupun secara Visi dan Misi organisasi Muhammadiyah tidak akan ikut campur dalam perpolitikan akan tetapi orang-orang atau individu-individu Muhammadiyah di bebaskan untuk ikut berpolitik.

Untuk merespon kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik di Indonesia tahun 1995-1998, Muhammadiyah baik melalui individu-individu maupun secara organisasi mengambil respon atas kondisi sosial terutama politik yang carut marut. Respon yang di maksud disini ialah tanggapan atau reaksi dari individu atau kelompok terhadap suatu permasalahan yang terjadi, yang mana respon tersebut dilakukan oleh Muhammadiyah dan permasalahan yang terjadi ialah kondisi sosial terutama kebijakan politik yang tidak kondusif pada tahun 1995-1998.¹⁴

Tentu saja merespon suatu permasalahan yang terjadi merupakan bentuk kajian sosial yang mana tidak lepas dari suatu peristiwa yang bisa memberi dampak yang besar ataupun

¹³ Daliman, *Metode Penelitian...* hlm. 83.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/respons> diakses pada tanggal 28 Februari 2018, pukul 12.13 WIB.

kecil. Dampak yang terjadi pada tahun 1995-1998 tentu sangat besar dan merubah tatanan politik di Indonesia yang mana Muhammadiyah sebagai organisasi ikut andil di dalamnya.

Aktivitas atau respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik tahun 1995-1998 ini menimbulkan peristiwa sejarah. dengan kata lain aktivitas ini bisa di katakan sebagai kajian sejarah yang menitikberatkan respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan, ekonomi, dan politik tahun 1995-1998.

4. Historiografi

Dalam tahapan ini peneliti menyajikan sintesa yang diperoleh dari data-data yang telah diolah kedalam bentuk penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian yang telah dilakukan.¹⁵

Adapun sistematika penulisan yang di lakukan oleh peneliti yaitu :

Bab I Pendahuluan, yang mana di dalamnya menguraikan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, dan Langkah-Langkah Penelitian.

Bab II Kebijakan Politik Orde Baru di Indonesia Tahun 1995-1998, dalam bab ini membahas mengenai Kebijakan Politik Orde Baru, yang mana di dalamnya dimuat terlebih dahulu kondisi sosial di Indonesia tahun 1995-1998, krisis ekonomi tahun 1997, dan mengenai kebijakan politik di bidang Pendidikan, Ekonomi dan Politik Orde Baru di Indonesia tahun 1995-1998.

Bab III Respon Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Politik Orde Baru di Indonesia Tahun 1995-1998, membahas mengenai Muhammadiyah dalam merespon kebijakan politik Orde Baru di Indonesia tahun 1995-1998, yang mana di dalamnya memuat

¹⁵ Sartono Kartodirjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metode Sejarah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, hlm. 4.

bagaimana respon Muhammadiyah terhadap kebijakan pendidikan, ekonomi, dan politik tahun 1995-1998,

Bab IV Penutup, dalam Bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran.

